



No : 002 /KCP/SK/IX/2019
Lamp. : 1 Berkas
Hal. : Surat Keterangan Penerbitan Buku

Jakarta, 20 September 2019

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Efriza, S.IP, M.Si
Jabatan : Direktur CV Kreasi Cendekia Pustaka
Alamat : Jl. Tebet Barat VIII No. 10
Tebet, Jakarta Selatan, 12830

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa buku berjudul: *PEREMPUAN DALAM PUSARAN KORUPSI (Telaah Pada Penyelenggara Negara) Monograf*, dengan rincian:

ditulis oleh : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.
diterbitkan oleh : Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka
nomor anggota IKAPI : No. 568/DKI/2019
cetakan ke-1 : September 2019
nomor ISBN : 978-623-91583-0-9

Buku tersebut di atas benar-benar diterbitkan oleh Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka dan disebarluaskan untuk umum.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,

KREASI CENDEKIA PUSTAKA

Efriza

(Direktur Kreasi Cendekia Pustaka)

CV Kreasi Cendekia Pustaka

Publishing & Printing

Jl. Tebet Barat VIII No. 10 Tebet, Jakarta Selatan 12830

Telf. +6221 831 4412 – Fax. +6221 831 4413

Email: kreasicendekiapustaka@yahoo.com



IKAPI

IKATAN PENERBIT INDONESIA

Jalan Kalipasir 32 Jakarta Pusat 10330 Telp. : (021) 3141907, 3146050 Faks. : (021) 3146050
E-mail : sekretariat@ikapi.org - Homepage : <http://www.ikapi.org>

TANDA ANGGOTA

No. 568/DKI/2019

Nama Perusahaan

CV. Kreasi Cendekja Pustaka

Jalan Tebet Barat VIII No. 10
Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Jakarta, 1 Februari 2019

PENGURUS PUSAT

Ketua Umum

Rosidayati Rozalina

Rosidayati Rozalina

Sekretaris Umum

M. Nurkholis Ridwan

M. Nurkholis Ridwan

PENGURUS DAERAH/PERWAKILAN

Ketua

Hikmat Kurnia

Hikmat Kurnia

Sekretaris

Mappa Tutu

Mappa Tutu

Berlaku s/d : 31 Januari 2021

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

PEREMPUAN DALAM PUSARAN KORUPSI

(TELAAH PADA PENYELENGGARA NEGARA)

MONOGRAF



Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

PEREMPUAN
DALAM PUSARAN KORUPSI
(Telaah pada Penyelenggara Negara)

MONOGRAF



KREASI CENDEKIA PUSTAKA

Perempuan dalam Pusaran Korupsi

Pol03 (xii + 58) 14.5 x 20.5 cm

Penulis:

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

Proofreader: Efriza

Desain Sampul: Hans Saputra

Layout Isi: Tim Kreasi Cendekia Pustaka

Hak pengarang dilindungi undang-undang
All rights reserved

Cetakan I: September 2019

Diterbitkan oleh:

Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP)

Jl. Tebet Barat VIII No. 10, Tebet, Jakarta Selatan, 12830
kreasicendekiapustaka@yahoo.com

ISBN: 978-623-91583-0-9

©Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi, sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

DAFTAR ISI

Prakata	iii
Kata Pengantar Penerbit	viii
Daftar Isi	xi

BAB I

Pendahuluan	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Tujuan Penelitian	5
4. Metode Penelitian	5

BAB II

Sejarah Perkembangan Kaum Perempuan	
Indonesia	7
1. Sejarah Perjuangan R.A. Kartini	7
2. Hilangnya Segregasi Gender	12

BAB III	
Perempuan Dalam Pusaran Korupsi	19
1. Perempuan dan Korupsi	19
2. Perempuan Dalam Pusaran Korupsi	34
a. Suami-Istri Terjerat Korupsi	34
b. Wanita Cantik di Balik Pusaran Korupsi	36
c. Kepala Daerah Wanita di Pusaran Korupsi	38
3. Mengapa Perempuan Dalam Pusaran Korupsi?	47
BAB IV	
Penutup	49
1. Kesimpulan	49
2. Saran	50
Daftar Pustaka	52
Biodata Penulis	58

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

PEREMPUAN
DALAM PUSARAN KORUPSI
(Telaah pada Penyelenggara Negara)

MONOGRAF



Perempuan dalam Pusaran Korupsi

Pol03 (xii + 58) 14.5 x 20.5 cm

Penulis:

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

Proofreader: Efriza

Desain Sampul: Hans Saputra

Layout Isi: Tim Kreasi Cendekia Pustaka

Hak pengarang dilindungi undang-undang

All rights reserved

Cetakan I: September 2019

Diterbitkan oleh:

Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP)

Jl. Tebet Barat VIII No. 10, Tebet, Jakarta Selatan, 12830

kreasicendekiapustaka@yahoo.com

ISBN: 978-623-91583-0-9

©Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi, sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PRAKATA

Pertama-tama penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah rahmat, serta taufik dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan monograf tentang **Perempuan Dalam Pusaran Korupsi (Telaah pada Penyelenggara Negara)** dengan baik. Monograf ini didasarkan pada kenyataan yang banyak terjadi pada perempuan masa kini, khususnya pada perempuan yang bergelut sebagai penyelenggara negara.

Meskipun monograf ini masih banyak memiliki kekurangan di dalamnya namun tidak mengurangi keinginan untuk menyempurnakannya agar pesan pada monograf ini dapat ditangkap dengan baik oleh berbagai segmen pembaca.

Gejala korupsi, kini memasuki era kedalaman yang hampir tak terukur. Secara horisontal korupsi menyebar di hampir semua cabang kekuasaan, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Pada garis vertikal korupsi bertengger di setiap hirarki pemerintahan, dari pusat kekuasaan hingga level terendah.

Era demokrasi ini membuka peluang sebesar-besarnya setiap individu masyarakat baik laki-laki dan perempuan untuk mengambil bagian, berperan dan berpartisipasi aktif dalam kebijakan publik hingga menduduki posisi strategis sebagai kepala daerah, anggota DPRD bahkan menteri. Dalam konteks perempuan, ada partisipatif 30% perempuan di kancah politik.

Karakter alamiah perempuan biasanya lebih berhati-hati, detail, dan banyak pertimbangan sebelum pengambil keputusan. Akan tetapi, ketika perempuan bertindak sebagai penyelenggara negara, acapkali

perempuan tersebut terbukti melakukan tindak korupsi dalam kesempatan yang ada. Tidak ada perbedaan antara pelaku korupsi laki-laki dan perempuan. Dengan demikian korupsi tak hanya menjadi *domain* pejabat laki-laki saja. Pejabat perempuan pun “sudah mampu berperan serta”.

Faktor yang menyebabkan perempuan mulai berani menjadi pelaku korupsi antara lain karena kedudukan atau kekuasaan yang dimiliki. Faktor lain adalah gaya hidup, karena masyarakat menilai keberhasilan seseorang berdasarkan materi dan penampilan bukan berdasarkan kapasitas, kinerja atau tindakan nyata.

Jadi, perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi menjadi pelaku/aktor korupsi, korban perilaku koruptif. Ada yang hanya menjadi pelaku turut serta bersama-sama suami, ada pula yang menjadi pelaku korupsi itu sendiri.

Penulis berharap, monograf sebagai luaran dari hasil penelitian ini dapat berperan sebagai media publikasi yang merupakan pengutaraan interpretasi sementara peneliti. Ini dapat menjadi salah satu referensi dan menjadi kontribusi dalam memahami penyelenggara negara perempuan dalam pusaran korupsi khususnya di kalangan akademik, dan umumnya bagi masyarakat luas.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., Rektor Universitas Bhayangkara Jaya yang tanpa lelah terus memprovokasi para dosen tetapnya untuk memberikan yang terbaik bagi Agama, Nusa Bangsa, dan terus berkontribusi positif bagi kemajuan Universitas Bhayangkara Jaya. Pada kesempatan yang berharga ini juga, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dan do'anya dari ananda

Ahmad Rais dan Fitri Nur'aini juga bagi adik-adikku Hj. Syahrida Syauket, S.H., Eniyati serta Maulana Syauket. Tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan untuk Brury Hotma Simbolon, S.Akt. yang selalu memotivasi penulis untuk terus berkarya dan Definitif Endrina Kartini Mendrofa, S.IP. atas kesabaran dan ketekunannya dalam membantu mewujudkan monograf ini.

Semoga kehadiran monograf ini dapat diterima dengan baik dan berguna dalam rangka memahami penyelenggara negara perempuan dalam pusaran korupsi.

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

KATA PENGANTAR PENERBIT

Monograf yang ditulis oleh Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si. ini menjelaskan mengenai Perempuan Dalam Pusaran Korupsi yang menyoroti pada level Penyelenggara Negara, hal mana telah terjadi fakta yang mencoreng muka kaum perempuan di era sekarang ini, perempuan juga terlibat korupsi dan ditetapkan sebagai koruptor.

Fakta sekarang ini berbanding terbalik, dengan semangat dan cita-cita R.A. Kartini yang merupakan pejuang perempuan untuk emansipasi perempuan. Kartini telah berhasil memompa semangat perempuan untuk turut terlibat dalam organisasi dan memiliki kebebasan dalam memilih karir yang diinginkannya, sehingga sekarang ini

perempuan menempati posisi penting dalam pemerintahan maupun institusi dan perusahaan multinasional. Namun dibalik itu, terjadi kemunduran popularitas emansipasi perempuan yakni adanya fenomena buram dari berbagai media massa yang memberitakan tentang keterlibatan perempuan dalam pusaran korupsi di negeri ini,

Dalam buku ini dikatakan, tahun 2016 bahwa seluruh penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni sebanyak 12,7 persen dari pihak yang dijerat karena korupsi adalah perempuan.

Realitas ini turut menyertai penulisan dalam merefleksikan sejarah perjuangan R.A. Kartini, yang telah meraih kesuksesan, namun perilaku politisi perempuan sebagai tersangka korupsi, seolah menodai makna emansipasi perempuan.

Akhir kata, analisis kritis dengan cara menyuguhkan realitas perempuan korupsi yang dibalut dengan refleksi perjuangan emansipasi perempuan oleh R.A. Kartini membuat karya ini sungguh baik untuk dinikmati oleh Pembaca. Dengan ini pula, Penerbit mengucapkan banyak terima kasih kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP) untuk menerbitkan buku yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia untuk terus menggelorakan perang atas Korupsi yang telah menggerogoti fondasi negara kita Indonesia tercinta.

Selamat Membaca.

Jakarta, 29 Agustus 2019

Efriza

DAFTAR ISI

Prakata	iii
Kata Pengantar Penerbit	viii
Daftar Isi	xi

BAB I

Pendahuluan	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Tujuan Penelitian	5
4. Metode Penelitian	5

BAB II

Sejarah Perkembangan Kaum Perempuan Indonesia	7
1. Sejarah Perjuangan R.A. Kartini	7
2. Hilangnya Segregasi Gender	12

BAB III

Perempuan Dalam Pusaran Korupsi	19
1. Perempuan dan Korupsi	19
2. Perempuan Dalam Pusaran Korupsi	34
a. Suami-Istri Terjerat Korupsi	34
b. Wanita Cantik di Balik Pusaran Korupsi	36
c. Kepala Daerah Wanita di Pusaran Korupsi	38
3. Mengapa Perempuan Dalam Pusaran Korupsi?	47

BAB IV

Penutup	49
1. Kesimpulan	49
2. Saran	50
Daftar Pustaka	52
Biodata Penulis	58

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Persamaan hak (emansipasi) antara wanita dan laki-laki yang dahulunya pernah diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini, kini telah menjadi suatu kenyataan. Kartini dahulunya memperjuangkan persamaan hak tersebut hanya dalam ruang lingkup dunia pendidikan. Dalam hal ini, Kartini meminta agar wanita Indonesia dapat untuk mengecap pendidikan yang lebih tinggi, sama dengan yang diberikan kepada kaum laki-laki. Kemudian Kartini juga meminta agar kaum hawa diberi kesempatan untuk berorganisasi, berkumpul dan dapat

menentukan pilihannya sendiri, dalam memilih pasangan hidupnya, dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Seperti yang berlaku pada kaum laki-laki. Tapi kini apa yang diperjuangkan oleh Kartini itu, bukan saja sebatas yang diharapkan oleh penulis buku *Habis Gelap Terbitlah Terang* itu, tapi malah melebihi daripada apa yang diperjuangkannya.

Dalam hal pendidikan, Wanita Indonesia sudah banyak mengecap pendidikan tinggi. Begitu juga dalam hal berorganisasi, baik organisasi massa maupun politik, wanita Indonesia tampil dengan cemerlang. Bahkan negeri ini juga pernah dipimpin oleh seorang wanita Dr. Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau umumnya lebih dikenal sebagai Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dalam bidang ekonomi, agama, budaya tidak

lagi terbilang jumlah para wanita Indonesia yang menggeluti bidang ini.

Keberhasilan kaum perempuan Indonesia sekarang ini adalah buah dari apa yang telah diperjuangkan oleh RA. Kartini pada masa lalu. Saat ini kaum perempuan telah banyak mengalami kemajuan. Keberadaan perempuan semakin dirasakan memiliki arti penting dalam pembangunan. Hal ini membuktikan visi Kartini di masa lalu menembus zaman sehingga kini banyak perempuan yang maju dan menempati posisi penting dalam pemerintahan maupun institusi dan perusahaan multinasional.

Ironisnya, di tengah berbagai kemajuan tersebut, tampak pula fenomena buram dari berbagai media informasi tentang keterlibatan perempuan dalam pusaran korupsi di negeri ini, dan peranan wanita Indonesia juga cukup kental keterlibatannya dalam berbagai kasus yang menjeratnya.

Inspirasi penulisan monograf ini berasal dari pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam konferensi pers 'Saya Perempuan Anti Korupsi' di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis, 16 Maret 2017.

Basaria Panjaitan, mengatakan sepanjang 2016, di antara seluruh penindakan kasus korupsi yang dilakukan KPK, sebanyak 12,7 persen pihak yang dijerat karena korupsi adalah perempuan.

2. Rumusan Masalah

Penelitian yang berjudul *Perempuan Dalam Pusaran Korupsi* (Telaah pada Penyelenggara Negara), dapat diarahkan kepada 2 (dua) hal pokok, sebagai berikut:

- a. Faktor utama apa yang menyebabkan perempuan berani menjadi pelaku korupsi?

- b. Bagaimana peran perempuan dalam pusaran korupsi?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini semata-mata difokuskan kepada:

- a. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan perempuan berani menjadi pelaku korupsi.
- b. Untuk memahami peran perempuan sebagai pelaku korupsi.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe fenomenologi. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder berupa studi pustaka, didukung dengan berbagai informasi yang aktual dari media informasi.

Hasil penelitian ini disajikan dengan mendeskripsikan perempuan sebagai penyelenggara negara dalam pusaran korupsi disertai dengan infografis yang relevan agar mudah dipahami bagi siapa pun yang membacanya. Sedangkan monograf merupakan luaran dari hasil penelitian ini.

BAB II

SEJARAH PERJUANGAN KAUM PEREMPUAN INDONESIA

1. Sejarah Perjuangan R.A. Kartini

Dalam Sejarah perjuangan kaum perempuan Indonesia telah mencatat nama-nama perempuan yang turut andil dalam aktivitas politik. Sejak Perjuangan fisik melawan penjajah telah mengabadikan nama-nama seperti Cut Nyak Dien, Martha Tiahahu, Yolanda Maramis, dan sebagainya. Dalam pergerakan nasional muncul nama Rasuna Said dan Trimurti. Khususnya R.A. Kartini, telah terpahat namanya sebagai orang yang memperjuang-

kan hak-hak perempuan untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan pria.

Kartini tidak sebatas kebaya dan seremoni. Kartini adalah mengenai hak perempuan, perjuangan kesetaraan Gender, dan nasionalisme Indonesia di akhir abad ke-19.¹

Pada usia enam tahun (1885), R.A. Kartini sudah mulai menyadari akan pentingnya persamaan hak dan derajat antara laki-laki dan perempuan, menolak semua aturan-aturan yang dinilai merendahkan perempuan. R.A. Kartini berpandangan bahwa perempuan harus diberi kebebasan untuk menuntut ilmu dan menduduki jabatan-jabatan di masyarakat. R.A. Kartini juga menyerang keras adanya “adat permaduan” pada waktu itu, karena baginya, semua wanita tentu tidak menghendaki dan tidak

¹ Ahmad Nurcholish, *Celoteh R.A. Kartini: 232 Ujaran Bijak Sang Pejuang Emansipasi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), h. vii

senang dimadu, dikarenakan permaduan sangat merendahkan martabat perempuan dan tidak sesuai dengan azas kemanusiaan. Kartini menentang, mencaci dan menghendaki agar adat permaduan itu lenyap dan dihilangkan di Hindia Belanda kala itu. Dalam emansipasi perempuan, R.A. Kartini berpendirian bahwa Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang sama hak dan derajatnya. Bahkan lebih tegas, R.A. Kartini mengatakan bahwa kaum perempuan yang beradab dan terpelajar akan dapat menjadi penolong dan pembantu yang berharga bagi kaum laki-laki.

Kartini adalah Kontradiksi, sebab ia cerdas sekaligus lemah hati. Ia tidak *enggan* menyerap ide masyarakat Barat tapi tidak takluk pada adat. Ia feminis yang dicurigai, ia dianggap terkooptasi oleh ide-ide kolonial. Tapi satu yang tak bisa dilupakan, ia inspirasi bagi gerakan nasionalisme di tanah air hingga

dewasa ini. Perempuan Jawa ini merupakan pemikir feminisme awal di Indonesia. Kartini perempuan yang gagasannya mencerahkan dan mengilhami banyak kalangan. Untuk hal ini, ia mewariskan ratusan pucuk surat yang adalah bagian dari korespondensinya dengan sahabat-sahabatnya di Belanda. Surat-surat tersebut sejauh ini merupakan dokumen tertulis paling awal hasil pemikiran perempuan, dengan cakupan topik yang beragam. Meliputi antara lain kebebasan, kemerdekaan, kesetaraan gender, kemandirian, dan pendidikan, yang bisa diperoleh dari masa itu. Sebagian dari surat itu dikompilasi dan diterbitkan sebagai buku yang judul aslinya *Door Duisternis Totlicht* yang kemudian diterjemahkan menjadi *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Dari surat-suratnya kita dapat membangun

gambaran mengenai sosok Kartini lebih dari sekedar profilnya.²

Ada beberapa perjuangan R.A Kartini baik dari segi Emansipasi, Pendidikan, maupun Kebangsaan. Seperti yang tercantum dalam infografis di bawah ini:

R.A. Kartini dan Perjuangannya

1885 (6th)
Kartini sekolah di *Europese*

1901 (12th)
Kartini dipingit. Dalam pingritannya ia membaca buku-buku yang diberikan ayahnya

Perjuangan Kartini

- Emansipasi**
 - Mengirim surat kepada Estelle "Stella" Zeehandelaar yang berada di Eropa mengungkap keinginan untuk menjadi seperti kaum muda Eropa
 - Menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia dimadu
 - Kartini menentang, mencaji dan menghendaki agar adat permaduan itu lenyap dan dihilangkan di Indonesia
- Pendidikan**
 - Dalam mata pelajaran ia menganjurkan agar diadakannya pembelajaran bahasa Melayu, Indonesia dan Belanda
 - Kartini mencela dengan tajamnya agar pemerintahan Belanda mengubah politiknya dan mengadakan pembaharuan yang berguna bagi masyarakat
 - Mendirikan "Sekolah Gadis" di daerah Jepara
- Kebangsaan**
 - Kartini tidak senang apabila ada orang yang selalu membanggakan asal keturunannya, bahkan Kartini sangat benci dan menentang.
 - Kartini berani melahirkan pendapatnya dan menuntut pemerintah Hindia Belanda agar menghapuskan penjualan candu opium dari pemerintah Belanda.
 - Memberikan beasiswa kepada Agus Salim demi kepentingan seluruh bangsa
 - Berkunjung ke Desa-desa guna mengetahui secara langsung keadaan rakyatnya

Sumber:
Tashadi (1985) RA Kartini

Peneliti :
Siti Ressa Maesara
Design :
Anggi Nindya Sari

SUAKAONLINE.com

(Sumber: <http://suakaonline.com/12773/2018/04/21/r-a-kartini-dan-perjuangannya/>)

² *Ibid.*, h. viii

Betapa singkat hidup Kartini, tapi panjang umur gagasan-gagasan progresifnya. Terlahir sebagai anak kesayangan Bupati Jepara, ia meninggal pada usia 25 tahun, empat hari setelah melahirkan anaknya, Soesalit. Meski bergelar Raden Ajeng, tapi ia tidak peduli hal itu. Bahkan meminta dipanggil Kartini saja, dia ingin menunjukkan bahwa semua orang sama, tidak dibedakan oleh pangkat, jabatan, atau gelar kebangsawanan.

2. Hilangnya Segregasi Gender

Sejak belasan tahun terakhir, kata Gender telah memasuki perbendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di dunia ketiga. Demikian juga di Indonesia, di hampir semua uraian program pengembangan masyarakat

dan pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah diperbincangkan masalah gender.

Gender merupakan konstruksi sosial budaya perilaku mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan, yang juga disebut budaya gender. Bila jenis laki-laki dan perempuan adalah atribut biologis yang tetap dan alamiah, maka (relasi) gender adalah ekspektasi dan konstruksi budaya mengenai hubungan laki-laki dan perempuan yang berubah-ubah, dinamis, dan mengalami modifikasi terus menerus bahkan sejak ada kesadaran sejarah mengenai perlunya kesetaraan hubungan laki-laki dan perempuan, gender terus diperjuangkan sebagai sebuah kebudayaan baru di masa kini dan di masa mendatang. Teori-teori pun tercipta sebagai “pisau” analisis dalam rangka

memahami, menjelaskan, dan menafsirkan relasi gender pada berbagai kaum sejarah.³

Pemberdayaan perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Salah satu tujuan pemberdayaan perempuan adalah menantang ideologi patriarki yaitu dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan, mengubah struktur dan pranata yang memperkuat dan melestarikan diskriminasi gender dan ketidakadilan sosial (termasuk keluarga, kasta, kelas, agama, proses dan pranata pendidikan).⁴

³ Farida Hanum, *Kajian dan Dinamika Gender*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), h.9

⁴ *Ibid.*, h.47

Sekarang dapat dilihat bahwa dalam dunia politik, wanita sudah berada dalam masa *modern* karena kita tahu bahwa sekarang partisipasi wanita dalam politik jauh lebih banyak dibanding dulu saat masa *tradisional* yang mana peran wanita cenderung pasif dan tidak mau tahu politik. Namun sekarang semakin terlihat bahwa dalam dunia politik, wanita sudah mau meninggalkan masa modern dan akan beralih kepada masa *post-modern*.

Politik dan kekuasaan sebagai anak kandung demokrasi telah menempatkan posisi perempuan dan lelaki pada level yang sama. Lebih lanjut, konstelasi politik dan kekuasaan terkini tak mengenal segregasi gender. Di sinilah tantangan pelaku politik dan kekuasaan, apapun gendernya, taruhannya adalah integritas. Bukan wajah tampan atau cantik bahkan artis ternama. Bukan pula sikap tenang penuh kata bijak laksana

malaikat. Zona maskulin dan feminin tak lagi memiliki batas yang jelas.

Pasca orde reformasi, kesadaran perlunya pelibatan perempuan secara kuantitas dan kualitas dalam politik muncul mengingat secara statistik jumlah perempuan relatif lebih banyak dibanding laki-laki. Keputusan politik negara kemudian mensyaratkan minimal 30 persen perempuan di parlemen. Syukur-syukur bisa lebih banyak, sehingga kepentingan perempuan "yang khas" bisa lebih diselami dan diakomodir pada banyak keputusan politis terkait kepentingan publik perempuan.

Ketika modernisasi demokrasi terbuka dan para perempuan "berbondong-bondong" masuk dalam zona "maskulinitas" politik negeri ini, publik pun berharap banyak pada mereka. Kandungan "feminisme" dalam diri perempuan diharapkan jadi pembawa perubahan. Sifat intuitif, kepedulian, rasa

kasih sayang, kelembutan dan sosok estetik perempuan setidaknya bisa memperkaya dinamika positif dunia politik.

Namun kenyataan yang tersaji di ruang publik tak seindah harapan bawah sadar mereka. Kemunculan perempuan pejabat pada kasus-kasus korupsi besar di negeri ini menghentak publik yang masih penuh harap pada kehadiran perempuan pejabat tersebut. Mereka berlaku tak lebih baik dari laki-laki pejabat. Sisa-sisa tabu dan sekat feminimisme-maskulinisme dalam benak publik perlahan 'hilang' ketika gebyar si cantik dan terkenal menjadi tersangka korupsi. Ada perempuan yang hanya turut serta bersama-sama suaminya, ada pula yang menjadi pelaku korupsi itu sendiri.

Pelaku korupsi memang tidak mengenal gender. Siapapun bisa berperilaku korup. Korupsi terjadi bukan disebabkan karena ia laki-laki atau perempuan, tetapi lebih

disebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan/ wewenang dan jabatan demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan keluarga, sanak saudara, teman, dan lain-lain. Selain itu, korupsi terjadi dikarenakan penegakan hukum yang lemah, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kebiasaan memberi gratifikasi, budaya permisif (tidak ada kontrol sosial), dan tidak diterapkannya nilai-nilai agama/ etika. Pelaku korupsi memang tidak mengenal gender. Tetapi dampak korupsi memiliki dimensi gender.

BAB III

PEREMPUAN DALAM PUSARAN KORUPSI

1. Perempuan dan Korupsi

Setelah gulitanya masa imperialisme tergantikan oleh cerahnya masa kebebasan, kilau-kilau emas kekayaan yang digenggam ibu pertiwi menyilaukan sebagai rakyatnya, mereka terdoda hingga lupa. Sampai-sampai emas yang seharusnya dapat memberi makan setiap bayi yang lahir, lenyap tenggelam ke dalam perut mereka yang dalam laksana lautan. Inilah awal bencana dan

keterbelakangan bangsa Indonesia, yakni Korupsi.⁵

Sepantasnya, negeri yang kaya raya ini dapat dengan mudah menghidupi rakyatnya dengan makmur, kalau saja kata "korupsi" tidak pernah ditemukan di kamus sejarah Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah serta daya tarik keindahan alam Indonesia menjadi potensi utama untuk menghadirkan kemakmuran bagi rakyatnya. Sayangnya, korupsi telah menjadikan potensi tersebut, ibarat, pohon yang ditebas dari akarnya, sehingga jangankan untuk berbuah, untuk bertahan hidup pun sulit dan akhirnya meranggas.⁶

Korupsi adalah perbuatan yang menyimpang dari kewajiban formal suatu peran publik karena kepentingan pribadi

⁵ Cris Kuntadi, *SIKENCUR (Sistem Kendali Kecurangan): Menata Birokrasi Bebas Korupsi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h. 154

⁶ *Ibid*, h. 155

(personal, keluarga, kelompok dekat), *entah* kepentingan itu berupa uang atau status; atau juga pelanggaran aturan yang melarang dilakukannya jenis-jenis tertentu cara mempengaruhi yang didasarkan pada kepentingan pribadi. Itu mencakup tindakan seperti suap (penggunaan suap/ imbalan untuk membengkokkan penilaian/ putusan seseorang dalam posisi kepercayaan publik); nepotisme (dilakukannya patronasi berdasarkan hubungan di luar kriteria kompetensi profesional); mendapatkan sesuatu melalui penyelewengan (secara illegal mengeruk sumber daya publik bagi penggunaan yang berciri kepentingan pribadi).⁷

Politik tidak hanya menyangkut konsep, namun juga terdiri atas *person*, proses, hubungan, lembaga, dan prosedur yang membuat keputusan-keputusan publik berwibawa. Semua hal yang bersifat politis

⁷ B. Herry Priyono, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 42 - 43

bisa dikategorikan dalam kegiatan politik. Politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi.⁸

Pengertian lain, korupsi berasal dari bahasa latin *corrumpere*, yang artinya menyalahgunakan, menyimpang, menghancurkan, mematahkan. Apa yang disalahgunakan? Kewenangan atau kekuasaan. Menyimpang dari apa? Dari aturan hukum dan norma atau moral. Menghancurkan atau mematahkan apa? Menghancurkan atau mematahkan kepercayaan. Ini berarti bahwa kata Korupsi mengandung makna yang sangat negatif karena mengacu pada suatu perilaku yang destruktif dan sangat merugikan.⁹

Korupsi bukan sekadar kesalahan sistemik atau birokratis, melainkan sudah bisa menjadi kejahatan kelompok, jika

⁸ Faridah Harum, *op.cit.*, h. 155

⁹ Zainal Abidin, A. Gimmy Prathama Siswadi, *Psikologi Korupsi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 11-12

dilakukan seseorang dalam rangka atau untuk kepentingan kelompok, katakanlah suatu partai politik. Bukankah kepengurusan partai membutuhkan banyak uang, khususnya untuk memenangkan pemilu? Dari lain pihak, wajar juga kalau partai menyelenggarakan pembelaan untuk anggota-anggotanya yang terlibat korupsi selama dia masih dianggap sebagai anggota partai yang terhormat.¹⁰

Penyebab korupsi di Indonesia pada umumnya menyangkut gaji yang kecil, kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, krisis mental para pejabat, administrasi dan manajemen yang dapat mengakibatkan prosedur yang berbelit-belit. Penyebab korupsi seperti di atas, bisa diperluas lagi seperti keinginan untuk memiliki atau membeli barang-barang tertentu yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat meningkatkan *prestise*

¹⁰ A. Sudiarja, *Percakapan Politik*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018), h. 93

atau gengsi secara pribadi maupun keluarga, antara lain seperti mobil, rumah mewah, villa, dan lain sebagainya. Yang tentu saja uangnya berasal dari korupsi, cara-cara yang demikian adalah untuk mengaburkan hasil korupsi. Untuk memenuhi kebutuhan barang-barang ekonomi dan konsumtif tersebut ternyata banyak yang tidak dapat bersabar, sehingga dalam kondisi terjepit karena didesak istri dan keluarga, memaksanya untuk menyeleweng dalam tugas yaitu mengambil uang negara dengan cara tidak halal.¹¹

Melihat berbagai fakta kemudian muncul pertanyaan, Apa kaitan antara perempuan dan korupsi? Kebijakan kuota 30 persen untuk perempuan tidak serta merta menjadikan perempuan akrab dengan politik. Penelitian mengenai hubungan antara perempuan dan korupsi dimulai pada tahun

¹¹ Burhanuddin Hasan, "Korupsi, Ciri, Sebab, Pemberantasan dan Kendala-kendalanya," *Jurnal Pemerintahan*, Volume IX No. 17, Bulan Juli - Desember 2014, (diakses 26 Januari 2019)

1999 oleh World Bank. Penelitian yang dilakukan oleh David Dollar, Raymond Fisman, dan Roberta Gatti (1999),¹² menemukan adanya korelasi positif antara jumlah perempuan di lembaga legislatif dan lembaga publik dengan tingkat korupsi di sebuah negara. Kajian ini kemudian menghasilkan teori bahwa peningkatan perempuan di lembaga legislatif dan dunia publik akan menurunkan tingkat korupsi.

Rekomendasi yang dihasilkan adalah perempuan merupakan kelompok yang dapat menghasilkan pemerintahan yang jujur dan bersih sehingga diperlukan peningkatan jumlah perempuan dalam dunia publik. Atas rekomendasi ini, sejak tahun 1998, banyak negara yang kemudian mendorong perempuan untuk terlibat lebih di dunia publik dengan tujuan untuk menghadirkan elemen kejujuran

¹² David Dollar, Raymod Fisman, dan Roberta Gatti, *Are Women Really the 'Fairer' Sex? Corruption and Women in Government*, The World Bank, 1999, Policy Research Report on Gender and Development Working Paper Series No. 4.

dalam kegiatan-kegiatan publik. Kondisi ini tidak hanya berlaku untuk lembaga legislatif, tetapi juga pada dunia publik secara umum. Diyakini bahwa semakin banyak jumlah perempuan di dunia publik maka akan semakin rendah praktek korupsi yang terjadi.

Namun berbanding terbalik dengan realitanya, Fenomena politisi perempuan menguat diwarnai oleh isu perempuan korup, perempuan selebriti sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg), atau anggota-anggota keluarga elit partai sebagai caleg (dinasti politik), stigma perempuan yang masuk dalam dunia politik erat dengan *image* korupsi, ketenaran, nepotisme, bukan karena kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki perempuan. Contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh, Miranda Goeltom, Wa Ode Nurhayati, dan Neneng Sri Wahyuni, menjadi gambaran bahwa seolah-

olah politisi perempuan erat dengan tindak korupsi.

Munculnya banyak nama perempuan dalam jeratan kasus korupsi menyiratkan adanya emansipasi perempuan pada berbagai bidang telah berjalan termasuk juga pada ranah korupsi. Fenomena perempuan banyak tersangkut korupsi merupakan gejala yang relatif baru di Indonesia. Perempuan yang memiliki kuasa politik lebih memungkinkan untuk melakukan tindakan korupsi dibanding mereka yang tidak punya kuasa. Laki-laki atau perempuan ketika memiliki diskresi dan minim pengawasan, akan berpeluang menyelewengkan kekuasaan.

Upaya mencegah dan melawan korupsi tidak akan mengalami kemajuan secara signifikan jika hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, birokrat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dibutuhkan suatu gerakan masyarakat yang kuat dan

meluas, melibatkan semua kelompok untuk melawan dan menghentikan berbagai tindakan korupsi. Namun luas dan kompleksnya definisi korupsi serta banyaknya bentuk-bentuk korupsi menyebabkan perempuan, terutama perempuan ditingkat akar rumput, mengalami kesulitan untuk mendeteksi kejahatan korupsi. Kurangnya pengetahuan perempuan terhadap tindak kejahatan korupsi ini, mengakibatkan perempuan seringkali menjadi korban dari tindak kejahatan korupsi. Bahkan, beberapa pakar anti korupsi menyatakan, bahwa perempuan, khususnya perempuan di tingkat akar rumput, relatif lebih toleran (permisif) terhadap tindak Korupsi, karena ketidaktahuannya dan lemahnya posisi tawar mereka di hadapan pejabat publik dan petugas layanan sosial. Di samping itu, Perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman hidup, kepentingan dan daya juang yang berbeda.

Perbedaan pengalaman, kepentingan dan daya juang ini akan berdampak pula pada perbedaan bersikap dan bertindak untuk melawan korupsi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, Perempuan cenderung sebagai pelaku korupsi. Perempuan terbukti melakukan korupsi dalam kesempatan yang ada. Tidak ada perbedaan antara pelaku korupsi laki-laki dan perempuan. Penulis melihat bahwa pandangan perempuan sebagai kelompok yang 'bersih' justru memberikan beban berlebih pada perempuan.

Hal ini juga sesuai dengan pandangan Anne M. Goetz (2007) yang melihat bahwa kehadiran perempuan dalam dunia politik sebagai agen anti korupsi merupakan argumentasi yang salah dan justru membebani perempuan.¹³ Karena korupsi tak

¹³ Goetz, Anner Maria, *Political Cleaners: Woman as the New Anti Corruption Force?* USA: Blackwell Publishing, 2007. Development and change.

hanya menjadi *domain* pejabat laki-laki saja. Pejabat perempuan pun "sudah mampu berperan serta". Korupsi bukan lagi sesuatu yang tabu bagi perempuan pejabat dan perempuan di lingkungan terdekat pejabat.

Hal ini semakin menyulitkan perempuan untuk terjun di dunia politik dan menyuarakan isu-isu yang menjadi aspirasi masyarakat dan perempuan pada khususnya. Sehingga, sampai kapanpun ketika *stereotype* ini masih berkembang di masyarakat, maka perempuan tidak akan pernah mendapat tempat yang sejajar dengan laki-laki dalam politik.

Fenomena perempuan banyak tersangkut korupsi merupakan gejala yang relatif baru di Indonesia. Tekanannya bukan pada persoalan kebetulan atau *by design*, melainkan lebih pada bagaimana kita memaknai perubahan sosiologis dalam konteks gender dan feminisme yang

bersangkut paut dengan skandal-skandal keuangan tersebut. Keran *Euforia* anti domestifikasi kebebasan sosial-politik yang terbuka pasca-reformasi rupanya berdampak positif pada kian menguatnya akselerasi perempuan di sektor publik. Setelah sekian lama terdomestifikasi oleh wacana dan kebijakan yang bias gender, pelan tapi pasti perempuan di Indonesia mulai menemukan 'jati diri'. Maraknya gerakan dari kaum feminis yang menuntut adanya kesamaan hak dan kesempatan (*equality of opportunity*) untuk mengakses sumber daya sosial, ekonomi-politik seperti halnya laki-laki, mulai banyak diafirmasi para pemangku jabatan dan pengambil keputusan di negeri ini.¹⁴

¹⁴Dewi Sekar Kencono dan Bhakti Wisnu Wardhana, *Perempuan dan Korupsi pada Ranah Publik (Ditinjau dari Gaya Kepemimpinan, Politik, Agama, Psikologi dan Budaya Ketimuran)*, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4863/4411>, (diakses 3 Februari 2019)



ISTILAH PEJABAT NEGARA DAN PENYELENGGARA NEGARA



Penyelenggara Negara :
Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif/legislatif/yudikatif dan pejabat lain yang tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai UU Pasal 1 angka 1 UU 28/1999



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme [UU 28/1999]

contoh penyelenggara negara yang pejabat negara:

- Pengganti/wakil presiden
- Ketua dan wakil ketua DPR/DPRD
- Menteri
- Gubernur
- Bupati/besar



Penyelenggara Negara meliputi:

- Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara:
- Menteri;
- Gubernur;
- Hakim;
- Pejabat negara lain uu
- Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; [UU ASN]

PEJABAT NEGARA SUDAH PASTI (ADALAH) PENYELENGGARA NEGARA. TAPI PENYELENGGARA NEGARA BELUM TENTU PEJABAT NEGARA

contoh penyelenggara negara yang bukan pejabat negara:

- Jaksa;
- Penyidik;
- Panitera Pengadilan
- Direksi, komisaris BUMN atau BUMD



November 2019 | Dina Nur | Bina Hukum

Perempuan yang tersangkut korupsi pada beberapa kasus dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara. Korupsi dan Penyelenggara Negara merupakan dua hal yang memang sulit dipisahkan seperti dua sisi dalam satu mata uang. Hal mana penyelenggara negara maupun pejabat negara tidak lagi dibedakan secara gender, antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, agenda antikorupsi tak relevan dikaitkan dengan agenda peningkatan representasi perempuan di arena politik. Peningkatan representasi perempuan sebesar 30 persen menyangkut soal Hak Asasi Manusia (HAM) dan partisipasi politik serta prinsip keadilan demokrasi. Di Indonesia, aturan kuota minimal 30 persen bagi perempuan yang duduk di kursi legislatif saat ini belum tercapai. Kuantitas yang belum memenuhi standar, berdampak langsung pada kualitas keterlibatan perempuan sebagai pelaku pengambil kebijakan di ranah politik.

2. Perempuan Dalam Pusaran Korupsi

a. Suami-Istri Terjerat Korupsi

Lili Martiani Maddari menambah daftar para istri pejabat yang terlibat langsung maupun tak langsung dengan aktivitas korupsi suami mereka. Istri Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti itu ditangkap tangan KPK tengah menerima suap dari pengusaha di kediamannya Selasa (20/6/2017). Selain Ridwan Lili, berikut ini delapan pasangan lainnya yang dihimpun Detik.

detik.com

9 SUAMI-ISTRI TERJERAT KORUPSI

PELAKU

APRIL 2012

Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin & Neneng Sri Wahyuni

OKTOBER 2013

Ketua MK Akil Mochtar & Ratu Rita

JANUARI 2015

Bupati Karawang Ade Swara Nuriatifah

MARET 2015

Wali Kota Palembang Romi Herton & Masyitoh

JULI 2015

Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho & Evy Susanti

JULI 2015

Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aijufri & Suzanna Budi Antoni

MEI 2016

Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pahri Azhari & Lucianty

DESEMBER 2016

Wali Kota Cimahi Atty Suharti & Itoc Techija

20 JUNI 2017

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti & Lili Martiani Maddari

KASUS

Menerima suap Rp 4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah, pemenang lelang proyek Wisma Atlet. Status hukum: Nazarudin dihukum 13 Tahun dan Neneng (6 tahun).

Menerima gratifikasi dari kepala daerah yang berpekerja di luar. Status hukum: Akil dihukum penjara hidup dan Ratu Rita masih saksi di pengadilan.

Menerima gratifikasi dari CEO PT Tatar Kertabumi, Bandung, senilai Rp 3 miliar. Status hukum: Ade dihukum 6 tahun dan Nuriatifah (5 tahun).

Menyuap Ketua MK Akil Mochtar senilai Rp 11,3 miliar dan 316 ribu dolar AS. Status hukum: Romi 7 tahun dan Masyitoh (5 tahun).

Menyuap tiga hakim dan panitera di PTUN Sumatera Utara. Uang suap 15 ribu dolar AS dan 5 ribu dolar Singapura. Status hukum: Gatot dihukum 3 tahun dan Evy (2,5 tahun).

Menyuap Ketua MK Akil Mochtar senilai Rp 10 miliar dan 500 ribu AS. Status hukum: Budi Dihukum 4 tahun & Suzanna (2 tahun)

Menyuap anggota DPRD Musi Banyuasin untuk memuluskan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2014 dan 2015. Status Hukum: Pahri dihukum 3 tahun dan Lucianty (1,5 tahun).

Menerima suap dari pihak swasta terkait proyek pembangunan tahap dua Pasar Atas Baru Cimahi. Status hukum: Masih disidangkan.

Diduga menerima suap dari kontraktor sebesar Rp 1 Miliar untuk pengerjaan proyek. Status hukum: Ditahan penyidik KPK.

Sumber: Detik.com

RISYI REGITA ARRIKTY | INFOGRAFIS: MINDRA PURNOMO/DETIK.COM

detiknews

(Sumber: <https://news.detik.com/infografis/d-3537616/9-pasangan-suami-istri-terlibat-korupsi>)

Infografis tersebut menggambarkan istri mendukung suami dalam melakukan korupsi, berperan sebagai penerima suap, penerima gratifikasi, juga pemberi suap dan pemberi gratifikasi yang biasa disebut broker suap. Para istri tersebut terlibat langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas korupsi suami mereka. Korupsi yang melibatkan para istri-istri tersebut, terungkap bahwa para istri tidak mempertanyakan sejumlah besar uang yang tiba-tiba didapat suaminya yang merupakan pejabat negara. Bahkan biasanya menerima dan mengucap syukur.

Dalam infografis tersebut juga tampak bahwa peran istri yang menyembunyikan harta hasil korupsi suami atau ikut serta dalam perkara korupsi.

b. Wanita Cantik di Balik Pusaran Korupsi

WANITA CANTIK DI BALIK PUSARAN KORUPSI



Steffy Burase

Mantan model ini diperiksa terkait dugaan suap penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 yang menyeret Gubernur Aceh Irwandi Yusuf



Jennifer Dunn

Artis cantik ini terseret dalam kasus korupsi Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan, pada tahun 2014



Dipta Anindita

Namanya terseret kasus korupsi simulator SIM, yang menjerat mantan Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Djoko Susilo



Anggita Eka Putri

Namanya muncul di kasus dugaan suap mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar pada tahun 2017 silam



Vita Nurhidayah

Namanya terseret di kasus korupsi kuota impor daging sapi yang menjerat pengusaha Ahmad Fathanah pada 2013



Ayu Azhari

Artis cantik ini diduga terima aliran dana korupsi kuota impor daging sapi yang menjerat Ahmad Fathanah pada 2013

Sumber: Kriminologi

Naskah: Aditia Tjandra

Infografik: Azmi H. Al Bekti

(Sumber: <http://www.tapanulimedia.co.id/2018/07/wanita-wanita-cantik-di-balik-pusaran.html>)

Infografis di atas menggambarkan bahwa tubuh perempuan tidak pernah habis untuk menjadi komoditas yang memiliki pengaruh dari berbagai segi. Korupsi misalnya, menjadi teman sehaluan dengan tubuh cantik perempuan. Dengan modal kecantikan, tubuh seksi, suara merdu, hingga kemampuan atraktif menggugah, akhirnya menerima bayaran rupiah bak setinggi langit dari para pelaku korupsi. Bahkan dibalik bagi-bagi uang haram itu ada pula praktik "jual tubuh" yang lazim dikenal dengan istilah "gratifikasi seks".

Gratifikasi seks bukan fenomena baru dalam dunia korupsi tetapi sudah merupakan salah satu hal yang tidak asing dalam dunia korupsi. Para perempuan cantik tersebut sebagai obyek dan item yang dapat dibeli dan dijual. Perempuan digunakan untuk melobi atau sebagai hadiah kepada pejabat negara yang ingin bekerja sama dengan pemberi suap korupsi.

c. Kepala Daerah Wanita di Pusaran Korupsi

Kriminologi

6 KEPALA DAERAH WANITA DI PUSARAN KORUPSI

RATU ATUT CHOSIYAH
Gubernur Banten
Terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. Ditahan KPK pada 20 Desember 2013

SRI HARTINI
Bupati Klaman
Tersangkut operasi tangkap tangan (OTK) KPK karena laporan masyarakat yang curiga ada praktik KKN di lingkungan kantor Bupati

ATTY SUHARTI
Wali Kota Cimahi
Atty dan suaminya Itoc yang menjabat Wakil Wali Kota terlibat korupsi proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi, Jawa Barat

SITI MASHITA
Wali Kota Tegal
Tersangka kasus dugaan suap pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Tegal

RITA WIDYASARI
Bupati Kutai Kartanegara
Didakwa menerima uang gratifikasi Rp 286 miliar dari 867 proyek Dinas PU di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar)

IMAS ARYUMNINGSING
Bupati Subang
Ditetapkan jadi tersangka kasus suap terkait pengurusan izin dari dua perusahaan di Subang, Jawa Barat

Sumber: Kriminologi.id
Naskah: Aditia Tjandra | Infografik: Amin H. Al Bahri

(Sumber: <http://picdeer.com/kriminologi.id>)

Infografis tersebut menjelaskan bahwa Di Pemerintahan, ada 6 Kepala Daerah dalam pusaran korupsi antara lain Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten, Sri Hartini sebagai Bupati Klaten, Atty Suharti sebagai Walikota Cimahi, Siti Mashita sebagai Walikota Tegal, Rita Widayarsi sebagai Bupati Kutai Kartanegara, dan Imas Aryumningsing sebagai Bupati Subang yang telah mendapat mandat dan kepercayaan dari rakyat untuk memimpin negeri ini.

Perempuan sebagai pelaku korupsi, di eksplorasi dalam dua hal sekaligus yaitu tindak pidana korupsinya dan pencemaran nama baik terkait gaya hidup yang melimpah alias keglamorannya.

Munculnya banyak nama perempuan dalam jeratan kasus korupsi menyiratkan adanya emansipasi perempuan pada berbagai bidang yang telah berjalan termasuk juga pada ranah korupsi.

Harus dipahami bahwa korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa melihat jenis kelamin. Kekuasaan dan kesempatan merupakan latar belakang utama dari praktik korupsi. Perempuan sebagai pelaku korupsi adalah perempuan yang memiliki kuasa politik, memiliki diskresi, minim pengawasan, yang akan berpeluang menyelewengkan kekuasaannya.

Pilihan sebagian besar perempuan masuk ke dalam institusi politik formal adalah ikut arus. Namun, sebagai pihak yang rentan dalam relasi kuasa yang timpang dan jumlahnya kecil (dalam lembaga politik), perempuan adalah pihak pertama yang dikorbankan melindungi kepentingan politik yang lebih besar, yang berpotensi menjerat pemain utama dalam kasus megakorupsi.

Di dalam bingkai kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia secara umum memberikan ruang yang luas dan ramah bagi

kaum perempuan untuk berkiprah dalam politik, termasuk menjadi pemimpin. Yang sering disebut sebagai perspektif demokrasi yang ramah gender (*gender democracy*). Bahkan, kesempatan ini terus diberikan, termasuk penetapan kuota 30 persen perempuan di parlemen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kasus korupsi adalah konsekuensi dari semakin banyak perempuan yang berkiprah di pemerintahan, legislatif, yudikatif, dan swasta. Hal ini sangat disayangkan jika kemampuan perempuan dalam bersaing diikuti dengan "persaingan" dalam melakukan korupsi.

Kaum perempuan akhir-akhir ini kerap masuk ke lingkaran kasus korupsi, baik

sebagai tersangka utama maupun sebagai pihak penerima uang hasil korupsi. Sebagai korban, biasanya karena perempuan tak tahu apa yang dilakukan para suaminya atau hanya melaksanakan perintah atasannya. Sementara itu, untuk perempuan yang menjadi tersangka korupsi, banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis menjadi korban sistem yang sudah korup.

Tentunya muncul pertanyaan dalam benak kita, mengapa justru sebagian besar perempuan yang terjun ke politik terseret arus korupsi? *Hedonisme* dan gaya hidup sosialita dianggap sebagai salah satu penyebab perempuan melakukan korupsi. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Biro Hukum KPK, Chatarina Girsang, saat menjadi pembicara dalam acara diskusi “Srikandi Melawan Korupsi” di Kantor Indonesia Corruption Watch, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (27/04/2015). “*Hedonisme* tidak lepas dari

motif perempuan melakukan korupsi," ujar Chatarina.



(Sumber: <http://kembiri.blogspot.com/2013/11/pic-inilah-ratu-atut-chosiyah-kim.html>)

Dari berbagai media yang mengunggah ilustrasi Ratu Atut sebagai perempuan berdandan Rp 1 Miliar. Gambar tersebut merinci harga barang-barang yang dikenakan Ratu Atut dari yang kepala hingga ujung kaki.

Gaya hidup yang hedonis ala selebritis telah mendorong para ibu untuk selalu memenuhi keinginannya. Pergaulan mahal sosialita, jalan-jalan keluar negeri, makan di restoran mewah, belanja barang-barang bermerek, *permak* kecantikan merupakan kebiasaan para ibu pejabat atau para ibu yang ber-uang saat ini. Berapapun besar gajinya atau gaji suaminya tidak pernah cukup untuk memenuhi keinginannya. Akhirnya, akan mendorong para suami atau dirinya untuk mendapatkan uang secara instan meskipun haram. Korupsi, broker suap atau penerima suap menjadi pilihan.¹⁵

Selain faktor *Hedonisme*, Korupsi kerah putih, karena didorong oleh faktor keserakahan, tidak mesti serakah materi tapi bisa juga serakah kuasa atau haus kekuasaan. Feminitas perempuan, naluri

¹⁵Riri Yanti Zahrul, *Keterpurukan Perempuan Dalam Kasus Korupsi Hiasi Media Massa*, http://www.academia.edu/10911482/Keterpurukan_perempuan_dalam_kasus_korupsi_hiasi_media_massa, (diakses 2 Februari 2019)

sebagai ibu yang suka memelihara atau melindungi, tidak jaminan akan bisa mengalahkan naluri dasar manusia lainnya: keserakahan. Jadi dalam hal korupsi, tidak ada feminisasi atau maskulinisasi. Laki dan Perempuan sama saja.¹⁶ Selain itu dari aspek politik, buruknya mekanisme demokratisasi internal partai politik dan indikasi adanya suap/ politik uang dalam penentuan ketua umum partai mencerminkan hilangnya dua mekanisme akuntabilitas institusi/ orang yang semestinya ada dalam konteks *good governance*.¹⁷ Hal mana Kepala Pusat Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor berpendapat, tingginya biaya politik ditengarai menjadi

¹⁶Sri Yuliani, *Perempuan, Politik Dan Korupsi*, <http://sriyuliani.staff.fisip.uns.ac.id/opini/perempuan-politik-dan-korupsi/>, (diakses 2 Februari 2019)

¹⁷Adnan Topan Husodo, *et.al, Setengah Hati Memberantas Korupsi* (Kumpulan Opini Kompas Staff ICW Era Presiden Joko Widodo), (Malang: Intrans Publishing, 2018), h. 102

salah satu faktor penyebab banyaknya legislator yang berperilaku koruptif.¹⁸

Dari aspek kontrol perempuan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bahwa ada yang berada di bawah kendali orang lain, ditipu dan diiming-iming pembagian hasil. Dengan kata lain, tergolong korupsi sistemik. Akan tetapi, ada juga yang memang atas kehendak sendiri karena pengaruh gaya dan pola hidup yang serba mewah dan konsumtif dalam pergaulan. Sedangkan dari aspek manfaat diketahui bahwa hasil korupsi yang dilakukan oleh perempuan tidak sepenuhnya dinikmati pelaku/ terdakwa perempuan itu sendiri melainkan untuk kepentingan anggota keluarga atau pihak lain.¹⁹

¹⁸Kompas, *Korupsi Massal di DPRD Dinilai Karena Biaya Politik Yang tinggi*, nasional.kompas.com/read/2018/09/04/10211701/korupsi-massal-di-dprd-dinilai-karena-biaya, (diakses 8 Februari 2019)

¹⁹Nilawati, *op.cit*, jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/download/439/390, (diakses 2 Februari 2019)

3. Mengapa Perempuan Dalam Pusaran Korupsi?

Sederet nama perempuan terseret dalam kasus korupsi. Setidaknya ada Sembilan nama yang bisa disebut di sini, mulai dari Angelina Sondakh, Miranda Swaray Goeltom, Nunun Nurbaiti, Wa Ode Nurhayati, Yulianis, Mindo Rosalina Manulang, Neneng Sri Wahyuni, Arthalyta Suryani (Ayin) hingga Harini Wiyoso. Mengapa perempuan?

Deretan nama-nama di atas kian membuktikan bahwa syahwat korupsi bukan hanya monopoli laki-laki. Korupsi telah menjadi kejahatan yang punya magnet luar biasa bagi siapapun yang tergoda. Dari 9 nama di atas, dua di antaranya adalah anggota DPR yakni Angelina Sondakh serta Wa Orde Nurhayati. Sementara, tujuh nama lainnya merupakan perempuan non-parlemen. Meski begitu, mereka berperan sentral dalam kasus korupsi. Sentralnya

peran yang dimainkan ini setidaknya bisa dilihat dari pekerjaan atau jabatan yang disandang.

Bila ditelusuri lebih jauh, keterlibatan perempuan dalam kasus-kasus belakangan ini juga banyak dipicu oleh adanya peluang atau kesempatan. Boleh jadi, sederet nama di atas awalnya tidak berniat korupsi. Namun, niat itu terbentuk seiring adanya peluang. Inilah yang kemudian disebut dengan *moral hazard* alias aji mumpung. Ada banyak "mumpung" yang menguatkan naluri berkorupsi, misal: mumpung berkuasa, berdekatan dengan kekuasaan, hingga mumpung bisa mendapatkan cipratan korupsi. Dalam sejumlah kasus korupsi, keterlibatan perempuan menjadi faktor penentu manakala korupsi yang direncanakan harus berjalan sistematis dan melibatkan banyak pihak.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian fenomenologi ini telah menarik kesimpulan bahwa:

- a. Faktor utama yang menyebabkan perempuan sebagai pelaku korupsi karena kekuasaan yang dimiliki perempuan tersebut. Faktor lain adalah *hedonisme* (pemburuan kenikmatan) karena gaya hidup sosialita yang tak terkendali, karena pemburuan kenikmatan, sebagai akar dari perilaku koruptif. Istri yang hedonis cenderung menjadi penyebab suami melakukan korupsi.

- b. Dalam pusaran korupsi, perempuan dapat berperan sebagai korban perilaku koruptif, ada juga yang berperan sebagai broker suap yang dilakukan baik sendiri maupun bersama suaminya. Bahkan menjadi pelaku korupsi itu sendiri.

Kedua hal tersebut menunjukkan sisi gelap perempuan yang terletak pada statusnya sebagai subyek dialektis, yang berarti subyek yang dinamis dan memiliki berbagai kemungkinan yang tak terduga. Fenomena perempuan dalam pusaran korupsi adalah bentuk emansipasi yang salah, telah menodai perjuangan R.A. Kartini.

2. Saran

- a. Untuk keluar dari jerat korupsi dibutuhkan sebuah gerakan yang kolosal dan sistemik untuk perang melawan korupsi. Korupsi yang sudah mengakar

hanya dapat diperangi dengan cara-cara yang fundamental, termasuk melakukan revitalisasi standar-standar etis agar nilai-nilai untuk berbuat kebajikan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan hina seperti korupsi bukan hanya sekadar slogan, tapi mengkrystal dalam setiap sanubari manusia Indonesia.

- b. Memberikan pelatihan Anti Korupsi; ini salah satu peran pemerintah untuk menciptakan program dalam pencegahan korupsi yang bisa diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal, Siswadi, A. Gimmy Prathama. 2015. Psikologi Korupsi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Goetz, Anner Maria. 2007. *Political Cleaners: Woman as the new Anti Corruption Force?* USA: Blackwell Publishing, Development and Change.
- Hanum, Farida. 2018. Kajian dan Dinamika Gender. Malang: Intrans Publishing.
- Kuntadi, Cris. 2015. SIKENCUR (Sistem Kendali Kecurangan): Menata

Birokrasi Bebas Korupsi. Jakarta:
Elex Media Komputindo.

Nurcholish, Ahmad. 2018. Celoteh R.A.
Kartini: 232 Ujaran Bijak Sang
Pejuang Emansipasi. Jakarta: Elex
Media Komputindo.

Priyono, B. Herry. 2018. Korupsi: Melacak
Arti, Menyimak Implikasi. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.

Sudiarja, A. Percakapan Politik. 2018.
Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Topan Husodo, Adnan. et.al., 2015. Setengah
Hati Memberantas Korupsi
(Kumpulan Opini Kompas Staff ICW
Era Presiden Joko Widodo), Malang:
Intrans Publishing.

B. Infografis

<http://suakaonline.com/12773/2018/04/21/r-a-kartini-dan-perjuangannya/>, (diakses 26 Januari 2019).

<https://www.kompasiana.com/triay/585dca0eed927300088b4568/ikutikutan-sosialita>, (diakses 26 Januari 2019).

<http://politiktoday.com/pejabat-negara/>
(Diakses 26 Januari 2019)

<https://news.detik.com/infografis/d3537616/9-pasangan-suami-istri-terlibat-korupsi> (Diakses 28 Januari 2019.)

<http://www.tapanulimedia.co.id/2018/07/wanita-wanita-cantik-di-balikpusaran.html> (Diakses 28 Januari 2019).

<http://picdeer.com/kriminologi.id> (Diakses 28 Januari 2019).

<http://kembiri.blogspot.com/2013/11/pic-inilah-ratu-atut-chosiyah-kim.html> (diakses 28 Januari 2019).

C. Internet

Dewi Sekar Kencono dan Bhakti Wisnu Wardhana,

PEREMPUAN DAN KORUPSI PADA
RANAH PUBLIK (Ditinjau dari Gaya
Kepemimpinan, Politik, Agama, Psikologi
dan Budaya Ketimuran),

[https://ejournal.undip.ac.id/index.php/
politika/article/viewFile/4863/4411,](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4863/4411)

(Diakses 26 Januari 2016).

Nilawati, Keterlibatan Perempuan dalam Tindak
Pidana Korupsi di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang,
[jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar
/article/download/439/390/](http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/download/439/390/), (diakses 2
Februari 2019).

Sri Yuliani, Perempuan, Politik Dan Korupsi,
[http://sriyuliani.staff.fisip.uns.ac.id/opi
ni/perempuan-politik-dan-korupsi/](http://sriyuliani.staff.fisip.uns.ac.id/opini/perempuan-politik-dan-korupsi/),
(diakses 2 Februari 2019).

Riri Yanti Zahrul, Keterpurukan Perempuan
Dalam Kasus Korupsi Hias Media Massa,
[http://www.academia.edu/10911482/Ke-
terpurukan_perempuan_dalam_
kasus_korupsi_hiasi_media_massa,](http://www.academia.edu/10911482/Ke-terpurukan_perempuan_dalam_kasus_korupsi_hiasi_media_massa)
(diakses 2 Februari 2019).

Kompas, Korupsi Massal di DPRD Dinilai Karena
Biaya Politik Yang tinggi,
[nasional.kompas.com/read/2018/09/04/
/10211701/korupsi-massal-di-dprd-
dinilai-karena-biaya,](https://nasional.kompas.com/read/2018/09/04/10211701/korupsi-massal-di-dprd-dinilai-karena-biaya) (diakses 8 Februari
2019).

D. Jurnal

Dollar, David. Raymod Fisman. Roberta Gatti. Are Women Really the 'Fairer' Sex? Corruption and Women in Government. The World Bank, 1999. Policy Research Report on Gender and Development Working Paper Series No. 4.

Burhanuddin Hasan, Korupsi, Ciri, Sebab, Pemberantasan dan Kendala-kendalanya, Jurnal Pemerintahan Volume IX No. 17 Bulan Juli-Desember 2014, (diakses 26 Januari 2019).

BIODATA PENULIS

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si., lahir di Bandung pada 3 November 1963. Ia berprofesi sebagai dosen tetap di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada tahun 1990, ia menyelesaikan S1 di Universitas Djenderal Soedirman, Purwokerto. Tahun 2000 lulus S2 dari Universitas Satyagama, Jakarta. Pendidikan S3-nya diselesaikan tahun 2013, di Universitas Padjadjaran, Bandung.